



PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON KELAS I B

Jalan Panglima Polim No. 3
Telepon 0645-31025 Fax (0645-31025)
e-mail : pengadilan.lhoksukon@gmail.com

Nomor : W1.U12/ 66 /KU.01/I/2018
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk
Operasional Kegiatan

Lhoksukon, 22 Januari 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Di

Banda Aceh.

Sehubungan dengan adanya Revisi Anggaran pada KPA dan telah keluarnya Pagu Minus Tahun 2017 sehingga mengubah Petunjuk Operasional Kegiatan dan mengubah Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L Satker (098480) Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan ini disampaikan :

1. Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan (ADK RKA-K/L Terlampir).
2. Kebenaran formil dan materil atau data yang disampaikan dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

JAMALIAH
NIP. 19611231 198303 2 019

PENGADILAN NEGERI LHOUKUKON KELAS I B

Jalan Panglima Polan No. 3
 Telp: 0945-31025 Fax: (0945 31025)
 e-mail: pengadilan.lhoukukon@ymail.com



Nomor : 101/2018
 W.101/2018
 KU.01/2018
 Tanggal : 23 Januari 2018
 Jenis : Perintah
 Objek : Perintah Perintah Data Petunjuk
 Operasional K. 101/2018

Yth. Kepala Kantor Ditjen Perbandaran Provinsi Aceh

Banda Aceh.

Sehubungan dengan adanya Revisi Anggaran pada KPA dan telah dilakukan proses
 Tahun 2018, yang telah dilakukan Petunjuk Operasional K. 101/2018, yang telah dilakukan
 (AGK) KPA-K/L. 101/2018, yang telah dilakukan Petunjuk Operasional K. 101/2018, yang telah dilakukan

1. Perintah Perintah Data Petunjuk Operasional K. 101/2018, yang telah dilakukan
 OPA pada Perintah Perintah (AGK KPA-K/L. 101/2018)

Perintah Perintah Data Petunjuk Operasional K. 101/2018, yang telah dilakukan
 data Petunjuk Operasional K. 101/2018, yang telah dilakukan Petunjuk Operasional K. 101/2018, yang telah dilakukan

Demiikian disampaikan, atas kerja sama yang baik di lingkungan masing-masing.





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098480/2017



DS:2987-0170-4978-9447

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

Revisi ke 01

Tanggal : 10 Januari 2018

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : | (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| 3. Provinsi | : | (06) | ACEH |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (098480) | PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON |
| Sebesar | : | Rp. 11.147.119.000 | (SEBELAS MILIAR SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SERATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 11.147.119.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN LHOKSEUMAWE | (089) Rp. | 11.147.119.000 |
|---------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.01.2.098480/2017



DS:2987-0170-4978-9447

Satker : (098480) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

| | | | |
|---------|--|-----|---------------|
| 01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp. | 3.552.119.000 |
| 01.1066 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 3.552.119.000 |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp. | 7.595.000.000 |
| 02.1071 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 7.595.000.000 |